

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Perpajakan bahwa Pajak ialah sebuah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun sebuah badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besanya kemakmuran masyarakat. Mengingat pajak merupakan pendapatan terbesar Negara, tentu saja pemerintahan berupaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor yang sangat potensial ini. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Menurut (Thomas Sumarsan, 2013) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pusat), Pajak Daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak.

Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Pajak Daerah menurut (Siahaan, Marihot P., 2013) “adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya komponen sektor jasa dan pariwisata adalah pajak restoran dan pajak hotel. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minumannya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sedangkan untuk pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gedung pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berikut ini adalah Data Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari tahun 2013-2017 :

Tabel 1.1
Data Pendapatan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2012-2016

Tahun	Total Pendapatan Pajak Hotel	Total Pendapatan Pajak Restoran
2012	Rp. 126.540.958.475	Rp. 172.882.689.664
2013	Rp. 151.418.187.250	Rp. 211.755.737.412
2014	Rp. 181.491.478.039	Rp. 242.449.158.737
2015	Rp. 187.821.983.629	Rp. 289.180.317.131
2016	Rp. 216.178.680.532	Rp. 330.838.390.097
2017	Rp. 232.820.901.397	Rp. 383.228.666.625

Sumber Data : BPKPD Surabaya

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat pertumbuhan dari pendapatan pajak hotel di Kota Surabaya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 pendapatan pajak hotel mencapai Rp. 126.540.958.475 dan pada tahun 2013 besar pendapatan pajak hotel yaitu sebesar Rp. 151.418.187.250, pada tahun 2014 sebesar Rp. 181.491.478.039, pada tahun 2015 sebesar Rp. 187.821.983.629, pada tahun 2016 sebesar Rp. 216.178.680.532 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 232.820.901.397.

Dan dapat terlihat pula pertumbuhan dari pendapatan pajak restoran di Kota Surabaya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan terus-menerus. Pada tahun 2012 besar pendapatan pajak restoran mencapai Rp. 172.882.689.664 dan pada tahun 2013 besar pendapatan pajak restoran sebesar Rp. 211.755.737.412, pada tahun 2014 sebesar Rp. 242.449.158.737, pada tahun 2015 sebesar Rp. 289.180.317.131, pada tahun 2016 sebesar Rp. 330.838.390.097 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 383.228.666.625.

Dengan melihat data pendapatan pajak hotel dan pajak restoran terus mengalami peningkatan yang sangat baik, penerimaan pajak hotel dan restoran mempunyai potensi yang besar untuk menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. Untuk tempat penelitian penulis memilih kota Surabaya sebagai tempat melakukan penelitian karena melihat fenomena penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang rata-rata mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis seberapa efektifkah pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di kota Surabaya dan melihat bagaimana kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BPKPD SURABAYA”**.

1.2 Penjelasan Judul

1. **ANALISIS** : untuk mencapai suatu tingkat lebih tinggi dari hanya memahami data, mengevaluasi informasi dalam hubungannya dengan semua faktor lain: pengetahuan umum, standar industri, hubungan, kecenderungan untuk berubah, dll. (Stapleton, James J., 2004)
2. **EFEKTIVITAS** : ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif . (Kamus terbaru Bahasa Indonesia, 2008)

3. **KONTRIBUSI** :sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya/kerugian tertentu. Sehingga dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas hotel dan restoran. (Guritno, T., 1997)
4. **PENERIMAAN** :ukuran nilai aktiva yang diterima dari pelanggan selama periode waktu tertentu, sama dengan arga pokok penjualan dan jasa-jasa yang diberikan dalam periode waktu tersebut. (Ardiyos, SE., 2006)
5. **PAJAK HOTEL** :pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. (Siahaan, Marihot P., 2013)
6. **PAJAK RESTORAN** : Pajak atau pungutan pajak daerah atas jasa pelayanan restoran. (Siahaan, Marihot P., 2013)
7. **PENDAPATAN ASLI DAERAH** : Pendapatan yang diperoleh Daerah yangdipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya tahun 2012-2016?

2. Bagaimana tingkat kontribusi pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya tahun 2012-2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, Peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat berguna bagi :

1. Bagi STIE Perbanas Surabaya
 - a. Agar antara menjalin kerja sama antara STIE Perbanas dan Perusahaan.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi BPKPD Surabaya
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukandalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran.

- b. Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan PAD guna meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran/rumah makan dan retribusi daerah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Menurut Husein Umar (2013, p. 42) data primer adalah:

“Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”.

Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013, p. 142) data primer adalah:

“Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”.

2. Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2013, p. 42) data sekunder adalah:

“Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram”.

Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013, p. 143) data sekunder adalah:

“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013, p. 240) dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan caramengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber, misal LSM.

Dengan cara melakukan pengumpulan dokumen yang berupa surat bukti pembayaran pajak, Laporan realisasi dan anggaran pajak hotel, pajak restoran dan laporan PAD Surabaya yang diperoleh dari BPKPD Surabaya.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013, p. 194), dokumentasi adalah:

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur kepada staf karyawan BPKPD karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Menjelaskan tentang tahap apa saja yang dilakukan oleh BPPKA dalam upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menjelaskan apakah terdapat perkembangan realisasi pajak Hotel dan pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

